



Sosialisasi E – Government Kepada Perangkat Desa Labuaja Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros

Hardiyanti Mungsi¹, Andi Rizka Auliah², Andi Nurkintan Ramadhani³, Giani Rezkika Amelia⁴, Riska Amalia⁵, Shahfika⁶, Septiara Rizky Trinanda⁷, Tiara Nur Qathifah⁸,

¹Program Studi Antropologi, FISIP, Universitas Hasanuddin

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Hasanuddin

³Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Hasanuddin

⁴Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Hasanuddin

⁵Program Studi Kimia, FMIPA, Universitas Hasanuddin

⁶Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, FIKP, Universitas Hasanuddin

⁷Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Hasanuddin

⁸Program Studi Kesehatan Masyarakat, FKM, Universitas Hasanuddin

e-mail korespondensi: andirizkaaa@gmail.com

Abstrak

E-Government merupakan suatu upaya yang dapat mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang dimana berbasis elektronik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. E-Government ini sendiri dapat diartikan sebagai suatu penggunaan teknologi yang digunakan untuk mentransformasi kegiatan-kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan penyampaian layanan kepada masyarakat. Pentingnya E-Government ini didasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan oleh kemajuan zaman yang semakin canggih. Selain itu, E-Government dapat menjadi wahana pertanggungjawaban bagi pemerintah desa atas penyelenggaraan pemerintahan, sehingga akan tercipta pemerintahan yang lebih baik kedepannya. Namun pada kenyataannya, pengetahuan ataupun pemahaman mengenai E-Government pada daerah pedesaan masih sangat minim dimana salah satunya yaitu di desa Labuaja. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan diketahui bahwa pemahaman para perangkat Desa Labuaja, Kecamatan Cenrana mengenai E-Government ini masih minim. Hal ini yang mendasari program kerja dalam kegiatan KKN ini yaitu pentingnya pemahaman mengenai E-Government bagi para perangkat desa demi kelancara kegiatan pemerintahan. Hasil dari kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan ataupun setidaknya dapat memberikan pemahaman kepada para perangkat desa Labuaja mengenai E-Government.

Kata kunci : E-Government, Digital, Transformasi, Pelayanan, Pemerintahan



Abstract

E-Government is an effort that can develop government administration which is electronic based by optimizing the use of information and communication technology. E-Government itself can be interpreted as a use of technology used to transform government activities that aim to improve effectiveness, efficiency and service delivery to the community. The importance of E-Government is based on the need for transparent government and the demands of an increasingly sophisticated era. In addition, E-Government can be a vehicle for accountability for village governments for governance, so that better governance will be created in the future. But in reality, knowledge or understanding of E-Government in rural areas is still very minimal where one of them is in the village of Labuaja. Based on the observations that have been made, it is known that the understanding of the apparatus of Labuaja Village, Cenrana District regarding E-Government is still minimal. This is what underlies the work program in this KKN activity, namely the importance of understanding E-Government for village officials for the smooth running of government activities. The results of this socialization activity are expected to provide knowledge or at least provide understanding to Labuaja village officials regarding E-Government.

Keywords: *E-Government, Digital, Transformation, Service, Government*

I. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menawarkan solusi untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang lebih berbasis *good governance*. Tuntutan masyarakat terhadap terbentuknya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan mendorong pemerintah untuk segera melakukan perubahan pada proses kerjanya, guna mewujudkan *good governance*. Tata pemerintahan yang baik memiliki kerangka yang sejalan dengan demokrasi yang dimulai sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintahan yang demokratis tentunya akan mengutamakan kepentingan rakyat, sehingga dalam pemerintahan yang demokratis pemberian pelayanan dan pelayanan publik merupakan hal yang terpenting dan merupakan ciri utama dari *good governance*. (Irawan, 2018)

Secara umum e-government dapat dikatakan sebagai aplikasi berbasis komputer dan internet yang digunakan untuk meningkatkan hubungan dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat atau yang sering disebut dengan G2C (Government to Citizen). Selain itu, hubungan antara pemerintah dengan perusahaan sering disebut G2B (Government to Business), bahkan hingga pemerintah daerah atau negara lain yang sering disebut G2G (Government to Government) sebagai partner (Mulyawati & Hedryawan, 2020)

Kesiapan sumber daya manusia, regulasi, dana anggaran, sarana dan prasarana merupakan hal mutlak yang harus disediakan dalam implementasi *E-Government* (Nugraha, 2018). Salah satu tujuan penerapan *e-government* adalah agar institusi pemerintah mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik. Di hal ini membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk merintis dan memulai hal baru



dalam birokrasi. Pemanfaatan *e-government* untuk birokrasi diharapkan dapat menjadi alternatif bagi reformasi birokrasi menuju pelayanan yang lebih baik.

Untuk mendukung kesuksesan implementasi *e-government*, maka pemerintah pada tahun 2003 telah mengeluarkan beberapa pedoman, antara lain Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Daerah, Pengembangan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Pemerintah, Panduan Penyusunan Rencana *egovernment* Lembaga, Pedoman Penyelenggaraan Diklat ICT dalam menunjang *e-government*, Pedoman tentang Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah. Kemudian dilengkapi dengan pedoman yang dikeluarkan pada tahun 2004 termasuk: standar mutu dan jangkauan pelayanan serta pengembangan aplikasi (*eservices*), kebijakan tentang kelembagaan, otorisasi, informasi dan keikutsertaan swasta dalam kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan manajemen perubahan, panduan pelaksanaan proyek dan penganggaran *e-government*, blueprint aplikasi *e-government* pusat dan daerah. Kemudian pada tahun 2006, pemerintah membentuk Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas) melalui Keppres No. 20 tahun 2006 yang salah satu tugasnya untuk mempercepat pelaksanaan *e-government*.

Menurut Clay G. Wescott yang dikutip oleh Richardus Eko Indrajit dalam bukunya yang berjudul “Electronic Government” (2016:4) mengemukakan bahwa: “E-Government adalah penggunaan informasi dan teknologi komunikasi (ICT) untuk memajukan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran biaya, mempermudah pelayanan yang lebih tepat, memungkinkan akses informasi publik yang lebih besar dan membuat pemerintah menjadi lebih bertanggung jawab kepada warga negara.”

Labuaja merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Desa Labuaja merupakan salah satu desa pariwisata. Objek wisata yang terkenal di desa ini adalah objek wisata alam Puncak Makkaroewa, Puncak Bulu Tombolo, dan Gua Salukang Kallang. Melihat potensi wisata yang ada pada Desa Labuaja, perangkat desa tentunya memiliki peranan yang penting dalam segala aspek. Khususnya di era digital (berbasis elektronik) menjadi sarana penting bagi perangkat desa untuk melakukan pekerjaannya sebagai bagian dari pemerintah desa. Pekerjaan akan lebih efektif dan efisien dibanding mengerjakan dengan cara manual. Untuk menciptakan sistem pemerintahan Desa yang demokratis dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kualitas pelayanan publik yang cepat dan akurat untuk menuju Desa Digital maka di perlukan aparatur Desa yang bisa mengikuti perkembangan tersebut.

Untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, maka Desa Labuaja memerlukan terselenggaranya Pemerintahan Desa yang baik (Good Governace) secara terus menerus. Upaya untuk mewujudkan good governance memerlukan unsur profesionalisme dari Aparatur / Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas Pemerintahan. Profesionalisme



disini lebih menekankan kepada kemampuan, ketrampilan, dan keahlian aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan

Setelah melakukan pengamatan, permasalahan yang dihadapi oleh perangkat Desa Labuaja yakni masih minimnya pemahaman mengenai Electronic Government itu sendiri. Maka dari itu, langkah yang dianggap tepat dalam mencetuskan program KKN Unhas Gelombang 108 Desa Wisata Maros adalah “Sosialisasi E-Government Kepada Perangkat Desa Labuaja” dengan tema “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Desa Labuaja Berbasis Digital” yang diharapkan pada sosialisasi tersebut setidaknya pemerintah Desa dapat memahami konsep dasar tentang E-Government itu sendiri, dimana nantinya dapat di implementasikan.

II. Metode Pelaksanaan

E-Government di pedesaan masih belum maksimal bahkan masih minim. Maka dari itu, bentuk pengabdian yang dilakukan pada program kerja ini adalah sosialisasi mengenai E- Government kepada pemerintah Desa Labuaja. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan, maka setidaknya perangkat desa yang berkaitan akan lebih mengetahui tentang konsep E-Government itu sendiri. Pelaksanaan Sosialisasi E-Government kepada perangkat Desa Labuaja dengan tema “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Desa Labuaja Berbasis Digital” dilaksanakan di Kantor Desa Labuaja pada hari Senin, 25 Juli 2022 pukul 10:00 WITA. Dengan Sasaran sosialisasi ini adalah seluruh perangkat/pemerintah Desa Labuaja, yang diundang sebanyak 18 orang. Dan yang hadir pada sosialisasi sebanyak 10 orang.

Jenis pengabdian yang dilakukan yaitu sosialisasi dengan mempertimbangkan data yang diterima. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data primer adalah jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber utama, bisa melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Biasanya, sumber data primer dipilih dan disesuaikan secara khusus untuk memenuhi tujuan penelitian tertentu. Sebelum memilih sumber pengumpulan data, tujuan penelitian dan populasi sasaran perlu diidentifikasi lebih dulu.

Setelah menerima data, ada 2 tahapan yang dilakukan dalam sosialisasi ini yaitu :

1. Penyampaian Materi

Materi pada sosialisasi ini terdiri dari 6 pembahasan inti yaitu definisi dari E-Government, dasar hukum yang melandasi E-Government guna memenuhi hak dari masyarakat desa, model – model E-Government, langkah – langkah pengembangan E-Government, kelebihan dan kekurangan dari E-Government, dan solusi dari penerapan E-Government.

2. Sesi Diskusi / Tanya Jawab

Setelah penyampaian materi telah berlangsung, selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang diperuntukkan untuk seluruh perangkat desa yang memiliki tanggapan mengenai materi yang bersangkutan. Sehingga diskusi dan komunikasi dua arah dapat berjalan dengan baik.

Indikator keberhasilan dalam program kerja pengabdian masyarakat ini adalah terlaksananya program kerja dalam bentuk sosialisasi dengan lancar yang dibuktikan dengan perolehan respon positif dari perangkat desa selaku peserta sosialisasi. Metode evaluasi yang dilakukan pada program kerja sosialisasi ini adalah dengan adanya pertanyaan langsung untuk mengukur sejauh mana pemahaman pemerintah desa seputar E-Government. Dengan begitu, materi sosialisasi tersampaikan dengan baik.

III. Hasil dan Pembahasan

Program kerja dari Kuliah Kerja Nyata (KKN) dirancang guna mengatasi permasalahan yang ditemui pada lokasi pengabdian dan sebagai bentuk langkah solutif yang bisa ditempuh. Bentuk program kerja individu yang diselenggarakan oleh KKNT Desa Labuaja, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros adalah sosialisasi mengenai E-Government kepada perangkat Desa Labuaja dengan tema “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Desa Labuaja Berbasis Digital”. Pelaksanaan sosialisasi berlangsung pada hari Senin, 25 Juli 2022 yang dimana pada kegiatan ini mendapatkan respon positif dari perangkat desa yang turut hadir di kantor Desa Labuaja. Ada tiga model penyampaian E-Government yang menjadi materi utama yakni:

1. Government to Citizen
2. Government to Business
3. Government to Government



(a)



(b)

Gambar 1. *Pembukaan sosialisasi (a) dan Pemaparan materi E-Government (b)*

Berdasarkan pengamatan selama sosialisasi berlangsung dan hasil temuan yang ada, pemerintah Desa Labuaja memberikan respon yang positif dan memberikan tanggapan bahwa pemerintah setempat bersifat terbuka akan transformasi digital apabila diperlukan. Namun, kendala utama pada Desa Labuaja adalah keterbatasan koneksi atau jaringan yang tidak memadai sehingga terjadinya kesulitan dalam mengakses website atau kesulitan untuk online, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai E – Government itu sendiri dan masih



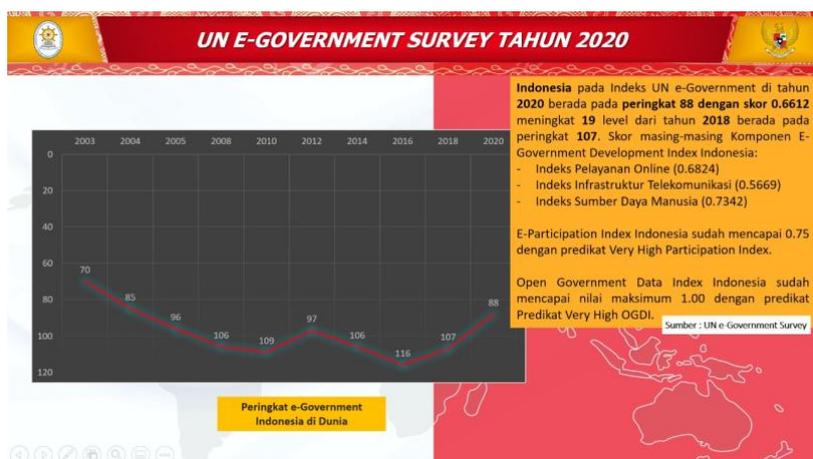
lemahnya kemampuan sumber daya manusia atau keahlian perangkat desa dalam hal ilmu teknologi dan informasi sehingga diperlukan pembinaan, bimbingan dan pelatihan secara rutin.



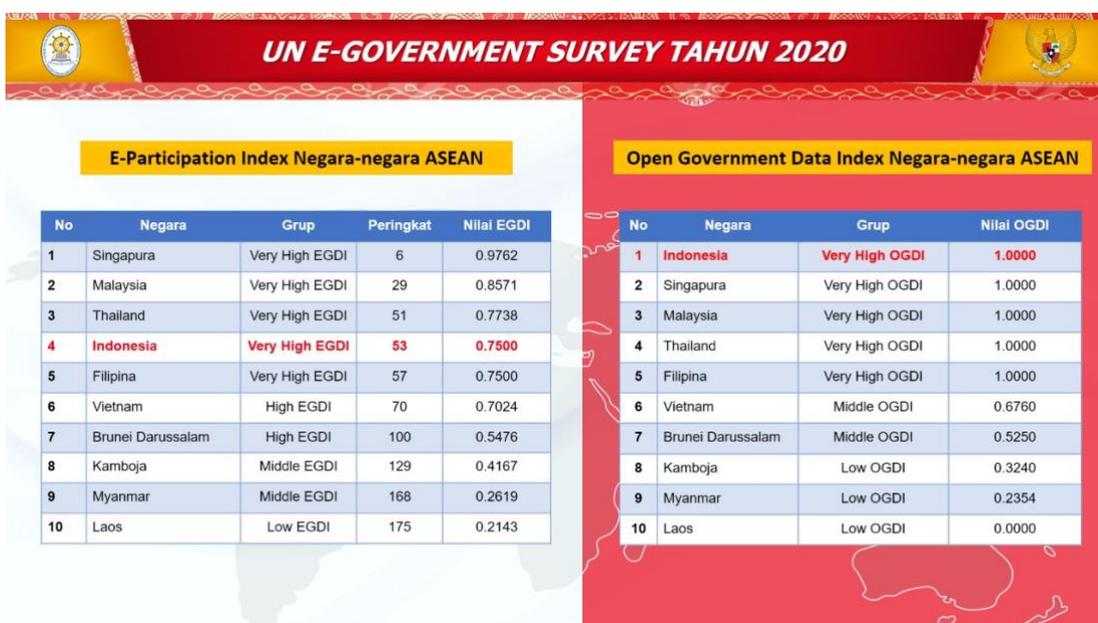
Gambar 2. Sesi diskusi / tanya jawab

Adapun tanggapan dari salah satu perangkat desa mengatakan bahwa beberapa anak muda dari Desa Labuaja telah mengikuti berbagai penyuluhan dan pembinaan, akan tetapi setelah mengikuti pelatihan, ilmu yang didapatkan tidak dapat di implementasikan. Sehingga tidak merubah keadaan dan ekspektasi. Maka dari itu, pelaksanaan sosialisasi E-Government ini ditujukan kepada seluruh perangkat desa agar nantinya bisa di eksekusi langsung ketika pemahaman dan pemberian materi telah disampaikan dengan baik dan mampu di implementasikan di masa yang akan datang.

United Nations (UN) e-Government Survey 2020 telah menempatkan Indonesia pada peringkat 88 atas pengembangan dan pelaksanaan *e-government* atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Indonesia juga patut berbangga, karena dalam rilis yang dikeluarkan oleh EGDI, Indonesia berhasil melompat naik 35 peringkat pada e-Participation Index tahun 2020, dari yang sebelumnya peringkat 92 pada tahun 2018, menjadi peringkat 53 pada tahun 2020 dengan skor 0.7500. Skor ini sudah di atas rata-rata dunia dengan skor 0.5677, di atas rata-rata Regional Asia dengan skor 0.6294, dan juga di atas rata-rata Regional Asia Tenggara dengan skor 0.6126. Hal ini membuat Indonesia naik predikat dari yang sebelumnya termasuk dalam grup High e-Participation Index menjadi grup Very High e-Participation Index.



(a)



(b)

Gambar 3. UN E-government Survey Tahun 2020 (a) dan (b)

Melihat hasil tersebut, dalam dua tahun terakhir sejak diterbitkannya Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang SPBE, atas kerja sama berbagai pihak, Indonesia telah menunjukkan geliat perubahan kearah yang lebih baik. Namun pada realita nya, masih banyak penyebaran E-Government yang tidak merata khususnya pada wilayah pedesaan, begitupula yang dialami oleh Desa Labuaja yang masih melakukan pelayanan manual. Sehingga pekerjaan rumah dari pemerintah setempat ialah perlunya menyusun strategi perbaikan penerapan SPBE dimana salah satu perbaikannya adalah penguatan infrastruktur telekomunikasi yang menjadi salah satu poin terendah dalam penilaian tersebut. Selain itu, penguatan aspek tata kelola, layanan, dan sumber daya manusia yang nilainya masih hanya sedikit di atas rata-rata, perlu menjadi perhatian untuk dapat memaksimalkan penerapan SPBE. Dengan begitu diharapkan,



seluruh aspek bangsa terus mampu berkomitmen penuh untuk mendukung pemerintahan digital dan pembangunan berkelanjutan dalam rangka memenangkan persaingan global.

IV. Penutup

Setelah melaksanakan pengabdian “Sosialisasi E-Government” di Desa Labuaja, Kecamatan Cenrana ditemukan adanya permasalahan mengenai bagaimana sistem pemerintah desa dalam melayani masyarakat di era perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat saat ini. Dari fakta yang ada dilapangan pemerintah Desa Labuaja masih belum memahami dengan baik tentang apa itu electronic government dan bagaimana pelaksanaannya agar memudahkan akses pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat sehingga kualitas pelayanan dapat meningkat. Pelayanan publik yang masih belum menggunakan Electronic Government ini juga membuat masyarakat mendapatkan pelayanan cenderung lamban dan tidak mendapatkan peluang dalam berpartisipasi pada proses dan institusi demokrasi. Kurangnya pemahaman pemerintah desa mengenai Electronic Government ini tidak lepas dari peran pemerintah pusat dalam pemerataan sosialisasi mengenai sistem pelayanan publik tersebut di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Oleh sebab itu pelayanan publik di Desa Labuaja, Kecamatan Cenrana masih belum mengikuti perkembangan zaman yang ada saat ini sehingga pelayanan publiknya masih terbelakang belum meningkat. Pemahaman Electronic Government yang kurang ini juga membuat pelaksanaannya dapat mengalami hambatan sehingga tidak dapat diimplementasikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa masih ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaan pengabdian “Sosialisasi E-Government” ini yaitu poin-poin yang menjadi pokok bahasan pada sosialisasi ini masih kurang mendalam karena hanya membahas pengenalan awal seperti definisi dari E-Government, dasar hukum yang melandasi E-Government guna memenuhi hak dari masyarakat desa, model – model E-Government, langkah – langkah pengembangan E-Government, kelebihan dan kekurangan dari E-Government, dan solusi dari penerapan E-Government. Maka dari itu diharapkan pada pengabdian selanjutnya, upaya pengenalan E-Government ini dapat dilanjutkan dan dikembangkan ke tahap berikutnya yaitu dengan memberikan sosialisasi mengenai bagaimana penggunaan E-Government seperti pembayaran pajak secara online, perpanjangan BPJS, dan lain-lain. Pemberian pelatihan-pelatihan berlanjut yang diikuti oleh seluruh pemerintah desa juga perlu dilaksanakan agar E-Government bisa dipahami dan dilaksanakan dengan lebih baik lagi. E-Government tentu saja akan berkembang mengikuti perkembangan zaman maka dari itu sudah menjadi tugas pengabdian selanjutnya untuk memperkenalkan hal-hal baru yang ada pada E-Government saat itu.



DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. (2022). *Tantangan Menuju Desa Digital (Berbasis Elektronik)*. Retrieved from <https://www.sanggi.id/artikel/2020/6/5/tantangan-menuju-desa-digital-berbasis-elektronik>
- Anonim. (2022). *Mengenal Data Primer dan Cara Mendapatkannya*. Retrieved from <https://algorit.ma/blog/data-primer-2022/>
- Atmajaya, D. G., & Wirata, G. (2021). Peranan e-Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Desa Sanding Kecamatan Tampaksiring. *Widyana*, 1-11.
- Eprilianto, D. F., Lestari, Y., Megawati, S., & Oktariyanda, T. A. (2021). Pendampingan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital Sebagai Upaya Adaptasi Desa Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Era New Normal. *Communnity Development Journal*, 767-776.
- Hardjaloka, L. (2014). Studi Penerapan e-Government di Indonesia dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi Di Sektor Publik. *Jurnal Rechtsvinding*, 435-452.
- Hikmah, N. (2021). *Kendala dan Tantangan Penerapan E-government di Indonesia*. Retrieved from https://www.academia.edu/49281137/KENDALA_DAN_TANTANGAN_PENERAPAN_E_GOVERNMENT_DI_INDONESIA
- Kuswandi, A., & Dewi Kurniasih, N. K. (2018). Pelatihan e-Government Bagi Aparat Pemerintah Desa Di Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang . *Jurnal Abdimas Mandiri* , 1-10.
- MENPANRB. (2020). *Hasil Survei PBB e-Government Indonesia Naik Peringkat*. Retrieved from <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/hasil-survei-pbb-e-government-indonesia-naik-peringkat>
- Nugraha, J. T. (2018). E-Government dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan e-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman). *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 32-42.
- Putra, W. C. (2019). *Pengaruh E-Government Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung*. Doctoral dissertation.
- Watrianthos, R., Nasution, A. P., & Syaifullah, M. (2022). *Model e-Government Pemerintah Desa*. Retrieved from <http://ulb.ac.id/wp-content/uploads/2020/11/MODEL-e-GOVERNMENT-PEMERINTAHAN-DESA.pdf>
- Wiralestari, Sam, I., Arum, E. D., Malinda, I., & Wijaya, R. (2021). Pemanfaatan e-Government di Masa Pandemi dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Jurnal Karya Abadi*, 497-501.
- Yudhanto, Y. (2016). *E-government untuk Desa*. Retrieved from Artikel Desa, Buku, Pendidikan, Teknologi dan Download Gratis: <https://www.sanggi.id/artikel/2020/6/5/tantangan-menuju-desa-digital-berbasis-elektronik>